BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah adanya sistem pendidikan yang mantap, terarah dan serasi, dengan harapan dapat membentuk manusia yang aktif dan kreatif, yaitu manusia yang mampu mempersiapkan lapangan kerja baru, bersikap adaptif dan produktif, dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menyesuaikan perubahan – perubahan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Djudju Sudjana (1976 :1) yang menyatakan bahwa :

> Pendidikan adalah kunci pertama dan utama bagi segala usaha pembangunan, manusia adalah subjek pembangunan. Manusia itu sumber utama yang menerima nikmat pembangunan itu. Pembangunan dapat mencapai perkembangan yang dinamis, apabila manusianya bergairah serta memiliki kemampuan untuk terus mengembangkan dirinya melalui pendidikan.

Secara spesifik tujuan pendidikan nasional dinyatakan dalam Undang – Undang Republik Indonesia No : 20 tahun 2003 Bab II pasal 2 dan 3 tentang dasar, fungsi dan tujuan Sistem Pendidikan Nasional, bahwa :

> Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi warga belajar agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa apabila mayoritas penduduk suatu negara masih buta aksara berarti negara tersebut dapat tergolong pada negara miskin (*Developing Countries*) dan sebaliknya apabila mayoritas penduduk suatu negara sudah melek aksara berarti negara tersebut dapat tergolong pada negara maju (*Developed Countries*).

Tingkat keaksaraan penduduk merupakan indikator penting bagi ukuran kinerja pendidikan keaksaraan yang selanjutnya digunakan dalam menentukan indeks pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan keaksaraan orang dewasa merupakan salah satu faktor penting dan sangat esensial dalam pembangunan manusia seutuhnya. Jika masih terdapat warga masyarakat yang buta aksara akan menjadi faktor penghambat bagi pembangunan pada sektor lainnya.

United Nation Development Programme (UNDP) menjadikan angka melek aksara menjadi indikator untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara. Di samping itu, rata–rata lama sekolah, angka usia harapan hidup (indeks kesehatan) dan pengeluaran keluarga, turut menentukan pula. Variabel kebutaaksaraan penduduk ini menjadi sangat penting, baik secara statistikal maupun secara praktis sehingga sangat mempengaruhi IPM suatu negara, oleh karena itu, ditinjau dari perspektif nasional maka pemberantasan buta aksara mempunyai nilai yang sangat strategis disamping indikator-indikator yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan data BPS bulan Juni 2006, jumlah buta aksara mencapai 8,35 persen atau sebanyak 13.186.255 penduduk. Sementara usia 15-44 tahun mencapai 2,89 persen atau sebanyak 3.227.593 penduduk dan usia 45 tahun ke atas mencapai 21,58 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 9.938.632 penduduk. Dari data tersebut, sebanyak 81 persen lebih penduduk

buta aksara terkonsentrasi di sembilan kantong buta aksara yakni di provinsi yakni Jawa Timur; Jawa Barat; Banten; Kalimantan Barat; Sulawesi Selatan; Nusa Tenggara Barat; Nusa Tenggara Timur; dan Papua. Sedangkan sisanya dibagi rata di 22 provinsi lain.

Oleh sebab itu, pada saat ini, diperlukan suatu bentuk pendidikan yang berkeadilan, yaitu pendidikan yang memiliki perluasan dan pemerataan kesempatan belajar kepada warga masyarakat baik pria maupun wanita, orang dewasa maupun anak – anak. Hal ini sesuai dengan undang – undang dasar 1945 dan perubahannya, pasal 31 ayat 1&2 yang berbunyi :"Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, Pendidikan Luar Sekolah mempunyai potensi dan posisi yang strategis untuk menanggulangi masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan ungkapan Napitupulu dalam D. Sudjana (2000 : 49), adalah sebagai berikut :

> Pendidikan luar sekolah adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur dan terencana yang bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia (sikap, tindakan dan karya) sehingga dapat terwujud manusia seutuhnya yang gemar belajar, mengajar dan mampu meningkatkan taraf hidup.

Sebagai realisasi dari penanganan yang serius terhadap kondisi masyarakat yang masih buta aksara, pemerintah menyelenggarakan Program Keaksaraan Fungsional. Program Keaksaraan Fungsional merupakan bentuk pelayanan Pendidikan Luar Sekolah untuk membelajarkan warga masyarakat

penyandang buta aksara, agar memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung, dan menganalisa, yang berorientasi pada kehidupan sehari – hari dengan memanfaatkan berbagai potensi (SDM, SDA, Sarana-prasarana) yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga warga belajar dan masyarakat dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

Tujuan program ini adalah membelajarkan peserta didik agar mampu membaca, menulis, berhitung dan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai dasar untuk meningkatkan usaha dan taraf kehidupannya. Strategi yang telah dikembangkan Direktorat Pendidikan Masyarakat, antara lain:

1. Pemberantasan buta huruf dilaksanakan di tingkat dasar (*grass* root) yang merupakan basis atau kantung masyarakat buta huruf yaitu tingkat RT/RW, desa/kelurahan, pemukiman tertentu, tempat kerja, perusahaan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur pendidikan yang ada di masyarakat, seperti madrasah, SD/SLTP, Pondok Pesantren, dll.
3. Memanfaatkan peran seluruh potensi sumber daya manusia, seperti guru, mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan/ibu-ibu.
4. Mengoptimalkan peran sekolah, perguruan tinggi, lembaga kursus, lembaga pelatihan swasta, SKB, BPKB, PKBM, Balai Pendidikan dan Pelatihan, Pondok Pesantren, Majelis ta'lim, dsb.
5. Menggerakan peran organisasi sosial kemasyarakatan antara lain, PKK, Dharma Wanita, LSM, Karang Taruna, Organisasi Mitra Dikmas (HIPKI, HISSPPI, Asosiasi profesi) Muslimat NU, Pemuda muhamadiyah,Remaja

Masjid, Pramuka, Organisasi Kemahasiswaan, Kadin, Apindo dan sejenisnya.

6. Program pemberantasan buta aksara dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program penyuluhan/pembimbingan/pendampingan pada masyarakat yang dilakukan sebagai sektor.
7. Program pembelajaran dirancang kontekstual dengan pekerjaan,minat, mata pencaharian, potensi sumber daya alam pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, usah produk kerajinan, pertukangan dan jasa.
8. Kegiatan pembelajaran bisa dilakukan di berbagai tempat dimana saja (sekolah, madrasah, masjid, gereja, balai desa, balai warga, kantor, pabrik, rumah, di tempat kerja, waktunya kapan saja disesuaikan dengan kesempatan yang ada pada warga belajar).
9. Melatih dan menyediakan tenaga pengajar, bahan belajar seperti buku – buku, modul – modul dan suplemen yang terkait dengan keterampilan untuk dijadikan mata pencaharian yang dapat memberikan penghasilan.

Setelah warga belajar mengikuti program keaksaraan fungsional yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui pusat – pusat kegiatan belajar masyarakat yang tersebar di berbagai daerah maka diperlukan suatu pendidikan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan peserta yang telah selesai mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional. Hal ini dikarenakan pendidikan tidak hanya sebatas memberantas kebuta-aksaraan tetapi dengan adanya pendidikan lanjutan maka warga belajar akan memperoleh kesempatan

yang lebih baik dalam menjalani hidup sesuai dengan minat dan kebutuhannya.

Berhubungan dengan hal tersebut, diperlukan adanya motivasi dari peserta didik agar hidup lebih baik dengan mengikuti pendidikan lanjutan yang sesuai dengan kebutuhannya. Motivasi peserta dalam mengikuti pendidikan lanjutan merupakan bentuk respon dari peserta pada waktu mengikuti pendidikan lanjutan, di mana motivasi peserta yang mungkin terjadi bisa meliputi dorongan dari dalam (motivasi intrinsik) dan dari luar (motivasi ekstrinsik). Berjalan atau tidaknya pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga berkaitan erat dengan tinggi rendahnya motivasi dari peserta didik yang telah selesai mengikuti program keaksaraan fungsional.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di PKBM Geger Sunten Cibodas Lembang bahwa dari 902 orang yang buta aksara baru dapat dilayani melalui program Keaksaraan Fungsional kurang lebih sebanyak 365 orang, dari jumlah tersebut 41 orang mengikuti pendidikan lajutan setara SMP, 60 orang mengikuti pendidikan lanjutan dibidang keterampilan tata boga, 80 orang mengikuti pendidikan lanjutan keterampilan menjahit. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa adanya keinginan, tujuan, dan alasan tertentu warga belajar mengikuti program pendidikan lanjutan.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti perlu kiranya mengetahui tentang gambaran motivasi untuk mengikuti pendidikan lanjutan bagi peserta yang telah selesai mengikuti program pendidikan

keaksaraan fungsional. Hal itulah yang menjadi bahan pertimbangan dan alasan penulis dalam merumuskan permasalahan yang akan diteliti.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka peneliti mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Keberhasilan warga belajar dalam mencapai harapan yang di inginkan dari suatu program yang di ikutinya karena adanya faktor-faktor yang mendorong dan menghambatnya. Hal ini berdasarkan pada studi pendahuluan yang dilakukan yaitu dari 365 orang yang telah lulus program pendidikan keaksaraan fungsional, hanya 181 orang yang mengikuti pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh PKBM Geger Sunten.
2. Motivasi merupakan penggerak bagi warga belajar untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan lanjutan, motivasi peserta merupakan salah satu faktor yang cukup penting. Motivasi ini merupakan penggerak bagi lulusan warga belajar keaksaraan fungsional untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Bagi orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, ia akan melakukan sesuatu itu dengan sungguh – sungguh. Hal tersebut ditandai dengan adanya keinginan untuk berkembang, begitu pula sebaliknya. Melihat pentingnya motivasi, maka penulis meneliti motivasi ini terhadap warga

belajar lulusan keaksaraan fungsional. Secara khusus penelitian ini dibatasi pada motivasi warga belajar lulusan program pendidikan keaksaraan fungsional untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Geger Sunten Cibodas Lembang.

Sedangkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah " Warga belajar lulusan program pendidikan keaksaraan fungsional yang mengikuti program pendidikan lanjutan memiliki motivasi tertentu dalam mengikuti program tersebut".

D. Pertanyaan Penelitian

Untuk mengarah dan mempermudah serta mengumpulkan data, maka penulis mengemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran motivasi warga belajar yang telah mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat warga belajar untuk mengikuti program pendidikan lanjutan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi motivasi warga belajar yang terjadi setelah mengikuti program keaksaraan fungsional di PKBM Geger Sunten.

2. Untuk memperoleh gambaran berkenaan dengan apa yang menjadi faktor pendorong dan penghambat warga belajar lulusan program keaksaraan fungsional untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

F. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang dapat diambil dari karya ilmiah ini, antara lain :

1. Memperoleh data mengenai motivasi warga belajar dalam mengikuti pendidikan lanjutan.
2. Memperoleh gambaran mengenai faktor – faktor yang menyebabkan warga belajar lulusan keaksaraan fungsional mengikuti pendidikan lanjutan.
3. Bagi lembaga, sebagai masukan untuk mengadakan peningkatan dalam rangka melaksanakan misinya, yaitu membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat, pemberian motivasi, pembinaan masyarakat, dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan.
4. Bagi jurusan, dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan gambaran mengenai motivasi warga belajar lulusan keaksaraan fungsional dalam mengikuti pendidikan lanjutan.
5. Peneliti sendiri yakni, sebagai bahan perluasan pengetahuan dan wawasan tentang motivasi warga belajar PKBM Geger Sunten serta keberhasilan program keaksaraan fungsional yang telah diselenggarakan.

G. Anggapan Dasar

Adapun yang menjadi anggapan dasar dari penelitian ini, antara lain :

1. Hersey dan Blanchard (Djudju Sudjana, 1992 : 115) mengungkapkan bahwa motivasi merupakan kegiatan untuk menumbuhkan situasi yang secara langsung dapat mengarahkan dorongan – dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan – kegiatannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
2. Safuri Musa (2005 : 32) mengungkapkan bahwa orang dewasa akan lebih antusias belajar apabila didorong oleh motivasi yang kuat.
3. Lyra Srinivasas (Safuri Musa, 2005 : 33) mengungkapkan bahwa kekuatan motivasi harus datang dari keyakinan dalam diri peserta belajar sendiri.

Kegiatan akan efektif apabila warga belajar merasa butuh untuk belajar, menyadari bahwa belajar itu penting bagi perubahan dirinya serta ikut ambil bagian secara aktif dalam merancang apa yang dipelajari, menentukan cara dalam mempelajari dan merasakan manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan belajar. (D. Sudjana, 1993 : 10).

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran dalam mengartikan istilah – istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dijelaskan istilah – istilah itu sebagai berikut :

1. Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan, dorongan atau impuls (Alma, 2004: 64 . Motivasi

dalam penelitian ini adalah motivasi yang dimiliki oleh peserta belajar yang telah mengikuti program pendidikan keaksaraan fungsional.

2. Kebutuhan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebutuhan belajar yang berorientasi pada mata pencaharian warga belajar lulusan program keaksaraan fungsional.
3. Peserta (Warga Belajar) adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur Pendidikan Luar Sekolah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 73 tahun 1991 Bab 1, Pasal 1, butir 2 dalam Djuju Sudjana, 2000). Warga Belajar dalam penelitian ini adalah warga belajar di PKBM Geger Sunten Jaya Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung.
4. Keaksaraan Fungsional adalah suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, mengamati, dan menganalisa, yang berorientasi pada kehidupan sehari – hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan selanjutnya, maka penulis memberikan gambaran umum tentang isi dan materi yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, merupakan uraian tentang Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Perumusan dan pembatasan masalah, Tujuan penelitian, Anggapan dasar, Pertanyaan penelitian,

Definisi operasional, Metode penelitian dan Sistematikan penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, secara garis besar meliputi Konsep Keaksaraan Fungsional, Konsep Pendidikan Luar Sekolah, Konsep Motivasi Belajar, Konsep Pendidikan Orang Dewasa, Konsep Pendidikan Berkelanjutan.

BAB III : Metode Penelitian, yang berisi metode penelitian, subjek penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan hasil penelitian mengenai motivasi warga belajar lulusan pendidikan keaksaraan fungsional untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan penjelasan akhir dari keseluruhan penelitian dan keterbatasan penelitian.